

**CENTER FOR INDONESIAN
POLICY STUDIES (CIPS)**

5 JUNI 2020

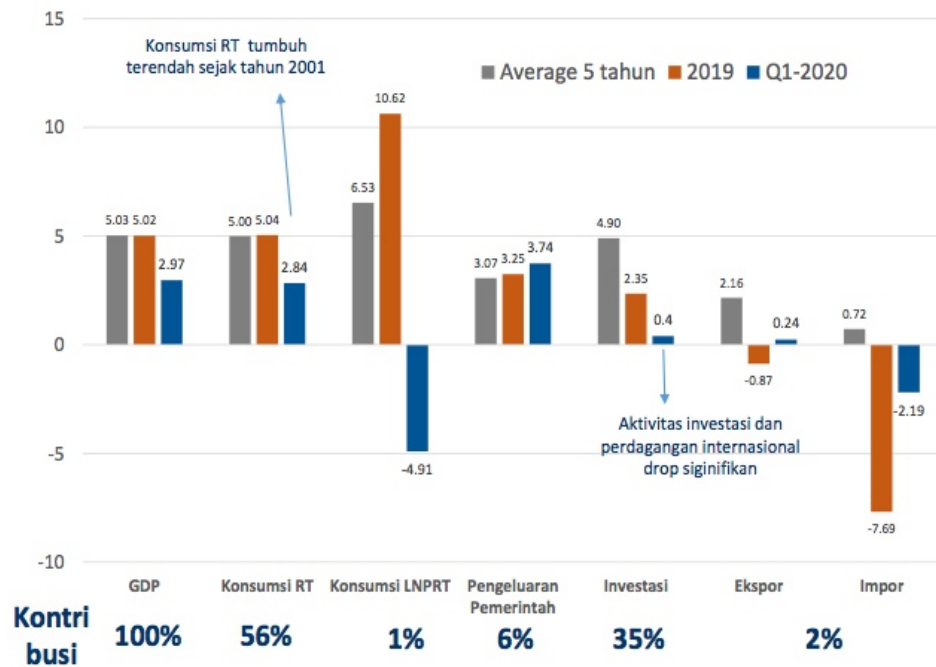
MENJAGA KINERJA SEKTOR INDUSTRI SELAMA PANDEMI COVID- 19

**Hariyadi B Sukamdani
Ketua Umum APINDO**



EKONOMI INDONESIA TRIWULAN I 2020

Growth GDP Berdasarkan Pengeluaran



Growth GDP Berdasarkan Lapangan Usaha

- Hampir seluruh sektor produksi tumbuh lebih rendah pada Q1-2020, terutama pada sektor berbasis komoditas, perdagangan dan transportasi.
- Terdapat 3 sektor yang tumbuh pesat, yakni Informasi dan Komunikasi, Jasa kesehatan dan Jasa keuangan

	Q1-2020	2019	Average 5 tahun
GDP	2.97	5.02	5.03
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	0.02	3.64	3.72
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0.43	1.22	0.31
INDUSTRI PENGOLAHAN	2.06	3.80	4.19
PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	3.85	4.04	3.47
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	4.56	6.83	5.53
KONSTRUKSI	2.90	5.76	6.04
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, DAN REPARASI MOBIL DAN MOTOR	1.60	4.62	4.12
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	1.27	6.40	7.22
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	1.95	5.80	5.28
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9.81	9.41	8.93
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	10.67	6.60	6.75
REAL ESTAT	3.83	5.74	4.32
JASA PERUSAHAAN	5.39	10.25	8.48
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	3.16	4.67	4.31
JASA PENDIDIKAN	5.89	6.29	5.31
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	10.39	8.68	6.90
JASA LAINNYA	7.09	10.55	8.87

Growth lebih tinggi dari tahun 2019 dan Avg tahun

KONDISI PENGUSAHA SEKTOR OTOMOTIF

- Menurut Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan pertahanan (IMATAP) Kemenperin, Putu Juli Ardika, Jumlah penjualan kendaraan roda empat atau lebih pada bulan Januari 2020 sebesar 80.400 unit atau turun 1,1% dari periode sebelumnya. Kemudian di Februari sebesar 79.500 unit atau turun 3,1% dari periode sebelumnya.
- Industri otomotif nasional juga mengalami keterbatasan pasokan bahan baku dan komponen terutama dari negara-negara yang menerapkan kebijakan *lockdown*. Hal ini membuat industri manufaktur kendaraan bermotor dipaksa mencari alternatif sumber bahan baku dan komponen untuk mempertahankan produksi.
- GAIKINDO menyampaikan koreksi target penjualan di tahun 2020, yang diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 50% akibat menurunnya permintaan dari dalam negeri dan luar negeri, saat ini sudah turun 30%. GAIKINDO melaporkan bahwa penjualan mobil tahun 2020 bisa turun dari 1.1 juta unit menjadi sekitar 500,000 unit.
- Adapun, Produsen otomotif besar seperti Toyota, Daihatsu, Honda sudah memutuskan menghentikan sementara sebagian aktivitas pabrik sebagai salah satu cara menangani dampak.

DAMPAK TERHADAP SEKTOR LAINNYA

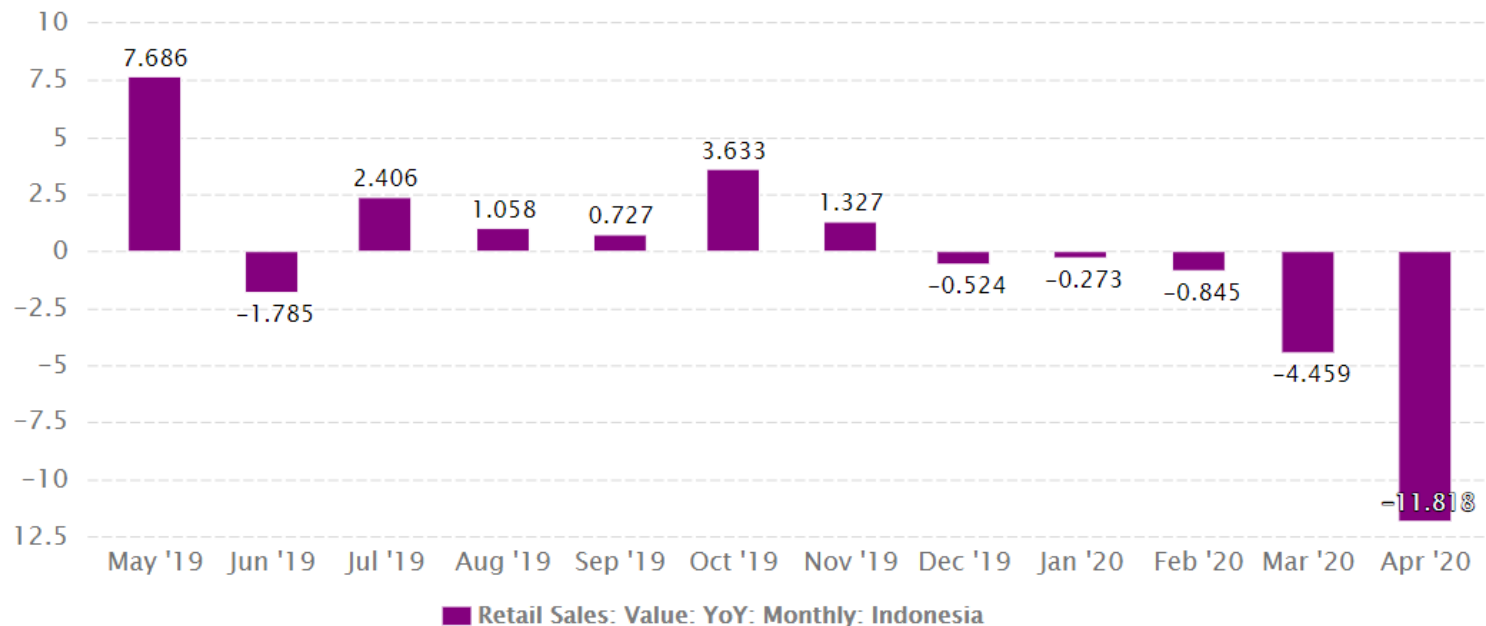
- **Sektor Elektronik (GABEL)** sejak Februari 2020 Impor dari Cina terhambat sangat signifikan. Kenaikan kurs USD juga memukul sektor ini. Pasar domestik sudah turun hingga 70%
- **Sektor TPT (API)** utilisasi hanya 14% dan sudah merumahkan 70% Pekerjaanya
- **Sektor Makanan dan Minuman (GAPMMI)**, akibat banyak Mall dan Grosir tutup menyebabkan turunnya konsumsi. Lebih dari itu untuk penjualan melalui non-pasar modern yang sekitar 70% kontribusinya menurun sangat tajam. Pekerja sudah dirumahkan dengan pembayaran gaji 50%
- **Sektor Alas Kaki (APRISINDO)** produksi turun 70%, bahkan salah satu pabrik terbesar sudah PHK 12.000 Pekerja dan menutup salah satu pabriknya
- **Sektor Industri Ban (APBI)**, kapasitas produksi dibawah 30% karena turunnya pasar export dan melemahnya industri otomotif domestik
- **Sektor Retail Non Makanan-Minuman (HIPINDO)** kemampuan cash flow hanya bisa bertahan hingga Juni karena omset turun sampai 90%
- **Jasa Pengamanan/Security (ABUJAPI)** dengan jumlah 1.6 juta orang pekerja juga sudah merumahkan 40% pekerjaanya

KONDISI SEKTOR PERHOTELAN DAN PARIWISATA



1. Potensi devisa yang hilang Januari-April 2020 sebesar US\$ 4 M
2. Lebih dari 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup dengan potensi hilang pendapatan Januari-April 2020 sektor hotel Rp. 30 T dan restoran Rp. 40 T
3. Kerugian maskapai penerbangan US\$ 812 Juta
4. Kerugian tour operator Rp. 4 T
5. Pekerja sektor pariwisata 90% di rumahkan atau unpaid leave, jumlah pekerja sektor pariwisata 13 juta orang

WABAH COVID-19 JUGA BERDAMPAK PADA RETAIL SALES GROWTH INDONESIA YANG TURUN SEMAKIN DALAM



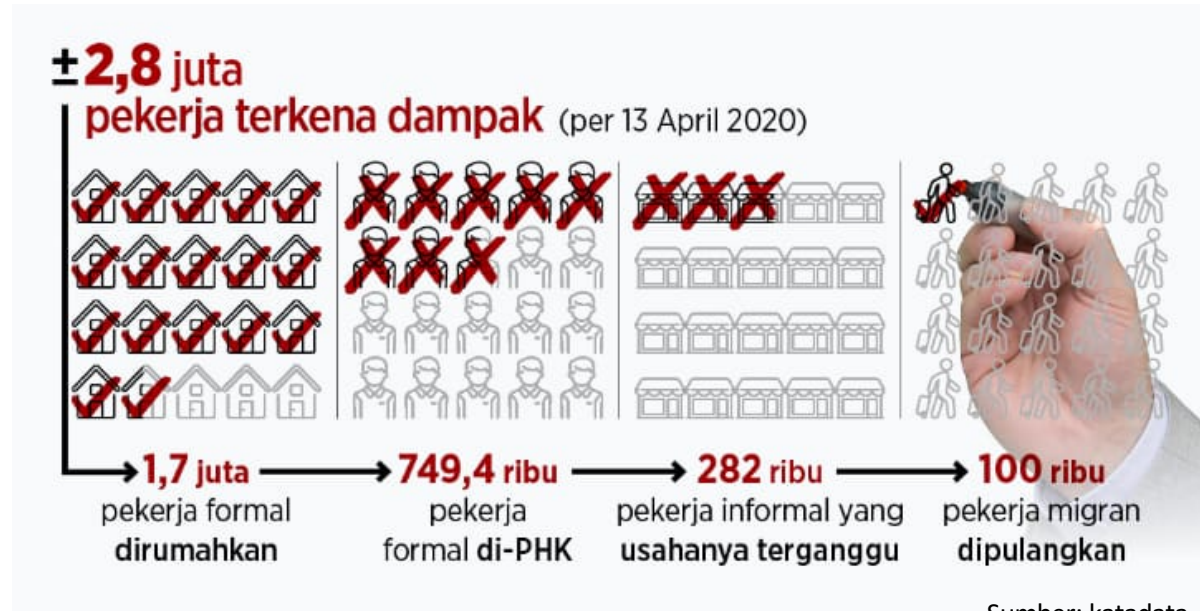
SOURCE: WWW.CEICDATA.COM | CEIC Data

DAMPAK TERHADAP SEKTOR LAINNYA

- **Transportasi Darat (ORGANDA)**, aktivitas bisnis turun 90 persen, sekitar 1 juta pekerja sudah dirumahkan.
- **Transportasi Udara (INACA)**, sejak dikeluarkannya Permenhub PM 25/2020 maka 24 April hingga 1 Juni tidak ada pesawat yang boleh beroperasi, tentu kondisi ini sangat memukul sektor perhubungan udara
- **Sektor Alih Daya (ABADI)**, sektor outsourcing hampir mirip ABUJAPI telah mengalami penurunan omset lebih dari 60%
- **Sektor Perkebunan Karet (GAPKINDO)**, terjadi penurunan permintaan karet yang signifikan karena turunnya penjualan otomotif baik pasar export maupun domestik
- **Sektor Perbankan dan Jasa Keuangan**, sampai saat ini belum jelas skenario Pemerintah untuk menopang sektor ini agar dapat bertahan mengingat mayoritas perusahaan sektor riil sudah meminta penjadwalan hutang dan Perbankan telah menghentikan penyaluran kredit

DAMPAK TERHADAP TENAGA KERJA

Kemenaker dan BPJS
Ketenagakerjaan mencatat ada
sekitar 2,8 juta pekerja terkena
dampak pandemic Covid-19. Hal
ini akibat terhentinya operasional
perusahaan tempat mereka
bekerja



Sumber: katadata

SURAT IJIN OPERASIONAL & MOBILITAS KEGIATAN INDUSTRI (IOMKI)



- Dasar Perijinan: SE Menteri Perindustrian no. 4 dan no. 7 Tahun 2020
- Penerbitan IOMKI sebanyak 17.000 perusahaan
- Kasus Covid 19 yang muncul relatif sedikit dan semuanya bisa ditangani oleh perusahaan
- Dengan kondisi tersebut maka dapat dilihat bahwa dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat maka tingkat keselamatan pekerja dapat dijaga dengan baik
- Dalam pelaksanaan Normal Baru partisipasi aktif pekerja sangat diperlukan untuk penerapan protokol kesehatan di perusahaan dan juga sosialisasi kepada pelanggan/masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan

STIMULUS COVID-19



Jerman US\$ 810 Milyar:
Perusahaan kecil menerima BLT
Euro 15.000 utk 3 bulan
Perusahaan besar Euro 400 M utk
Jaminan Kredit

China US\$ 424 Milyar:
Bantuan utk pengusaha 3 T Yuan

New Zealand US\$ 120 Milyar:
BLT utk pekerja US\$ 6 M

Malaysia US 62.9 Milyar:
BLT utk pengusaha dan pekerja

Singapore US\$ 44.4 Milyar:
BLT utk pengusaha dan pekerja

Thailand US\$ 43.3 Milyar:
Moratorium kredit 6 bulan
BLT utk pekerja

APAKAH STIMULUS COVID-19 EFEKTIF?

Fiskal:

PPh 21: Pada kenyataan saat ini mayoritas pekerja menerima kurang dari gaji normal, sehingga dengan batasan stimulus untuk gaji Rp. 200 jt/thn atau Rp. 16.67 jt/bulan tidak dirasakan manfaatnya

PPh 22: Pembebasan pembayaran pajak impor dimuka dengan kondisi pasar domestik yang drop menyebabkan impor menurun tajam sehingga manfaat stimulus ini relatif kecil

PPh 25: Angsuran PPh 25 dikenakan discount 30% dan bayar 70%, dengan kondisi mayoritas perusahaan rugi tahun 2020 maka bila perusahaan bayar angsuran 70% malah akan lebih bayar dan restitusi pajak akan makan waktu lama

Kartu Prakerja:

Insentif kompetensi dan semi jaring pengaman sosial ini tidak dapat menjangkau sepenuhnya pekerja terdampak Covid 19 karena sistem pendaftaran terbuka, dan tidak tepat dengan kondisi saat ini yang dibutuhkan jaring pengaman sosial sepenuhnya

STIMULUS COVID 19 DALAM PROSES

1. BPJS Ketenagakerjaan
2. BPJS Kesehatan
3. Beban Infrastruktur: Penghapusan Minimum Charge dan Penurunan Tarif Listrik dan Gas

KEBIJAKAN APA YANG EFEKTIF?

Relaksasi Pembayaran Hutang Kepada Lembaga Keuangan:

POJK 11/2020 telah memberikan kelonggaran bagi debitur untuk menjadwalkan pembayaran hutang kepada LK. Saat ini proses yang berjalan lancar pada LK dengan likuiditas yang besar, sedang LK dengan likuiditas terbatas proses penjadwalan hutang berjalan alot

Surat Edaran Menteri Perindustrian no. 4 & 7/ 2020:

Membantu industri yang mengerjakan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi dengan mengajukan surat izin operasi dan mobilitas melalui daring

Surat Edaran Menaker no. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang THR:

Membantu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan pembayaran THR secara dicicil atau ditunda hingga Desember 2020

REALITAS YANG DIHADAPI

1. Keterbatasan keuangan negara
2. Traumatik pejabat pengambil keputusan terhadap tuntutan pidana
3. Lemahnya koordinasi penyelenggara negara
4. Cakupan test Covid 19 yang masih dibawah target
5. Rendahnya pengetahuan masyarakat untuk antisipasi Covid 19
6. Besarnya jumlah penduduk miskin dan rentan miskin
7. Terbatasnya cadangan dana pada perusahaan sektor riil
8. Penurunan pendapatan masyarakat
9. Dunia berubah dengan “New Normal”

Kita harus realistis untuk hidup berdampingan dengan Covid 19 hingga ditemukan vaksin atau terjadi herd immunity dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat

POSTUR APBN 2020



Total gross financing for 2020F (in Rp tr)

2020 Financing Need	APBNP2020_1	APBN2020_2	Changes (Rp tr)
Deficit (% of GDP)	(5.07)	(6.27)	(1.2)
Deficit	852.9	1,028.5	175.6
Non-Debt Financing Nett	153.5	178.8	25.3
Maturing Debt	433.4	433.4	-
Total Gross Financing Need	1,439.8	1,640.7	200.9
Sources of debt financing	1,439.8	1,640.7	200.9
1. Loan program	150.5	150.5	-
2. Gross government securities	1,289.3	1,490.2	200.9

Source: MoF, Mandiri Sekuritas estimate

Assuming below-the-line financing of Rp178tr (investment, fund placement, etc), total gross financing for 2020 will be Rp1,640tr.

Catatan: Rapat Kabinet 4/6/20 menetapkan pelebaran defisit menjadi 6.34% atau Rp 1.039.2 T

STIMULUS 18 MEI 2020

Instrumen Kebijakan	Penerima Akhir	Total
I. Dukungan Konsumsi PKH (Rp37,4T), Sombako (Rp43,6T), Bansos Jabodetabek (Rp6,8T), Bansos Non-Jabodetabek (Rp32,4T), Pra Kerja (Rp20T), Diskon Listrik (Rp6,9T), Logistik/Pangan/Sombako (Rp25T)	RT Miskin dan Rentan serta Terdampak	172,10
II. Subsidi Bunga BPR, Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan (Rp27,26T), KUR, UMI, Mekaar, dan Pegadaian (Rp6,4T), dan UMKM Online, LPDB, Koperasi, dll (Rp0,49T)	UMKM, Dunia Usaha, Masyarakat	34,15
III. Insentif Perpajakan PPh 21 DTP (Rp39,66T), PPh Final UMKM DTP (Rp2,4T), Pengebaban PPh 22 Impor (Rp14,75T), Pengurangan Angsuran PPh 25 (Rp14,4T), Pengembalian Pendahuluan PPh (5,8T), Penurunan Tarif PPh Badan (Rp20T), Cadangan dan Stimulus Lainnya (Rp26T)	UMKM, Dunia Usaha, Masyarakat	123,01
IV. Subsidi BBN dalam rangka B-30	BLU	2,78
V. Percepatan Pembayaran Kompensasi Pertamina (Rp45T) dan PLN (Rp45,42T)	BUMN, Masyarakat	90,42
VI. Tambahan Belanja K/L dan Sektoral Pariwisata (Rp3,8T), Perumahan (Rp1,3T), dan Cadangan Stimulus Fiskal Lainnya (Rp60T)	Masyarakat	65,10

Source: MoF (as of 18 May 2020)

Instrumen Kebijakan	Penerima Akhir	Total
VII. Dukungan untuk Pemda Cadangan DAK Fisik (Rp9,1T), DID Pemulihan Ekonomi (Rp5T), dan Penyediaan Fasilitas Pinjaman ke Daerah (Rp1T)	Masyarakat	15,10
VIII. Penjaminan untuk Kredit Modal Kerja Baru bagi UMKM Belanja IJP (Rp5T) dan cadangan penjaminan (Rp1T)	UMKM	6,00
IX. PMN PLN (Rp5T), HK (Rp11T), BPUI* (Rp6,27T), PNM (Rp2,5T), dan ITDC (Rp0,5T)	BUMN	25,27
X. Talangan (Investasi) untuk Modal Kerja PT Garuda (Rp8,5T), Perumnas (Rp0,65T), KAI (Rp3,5T), PTPN (Rp4,0T), dan KS (Rp3T)	BUMN	19,65
XI. Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM	Perbankan	87,59**
Total		641,17

*Rp 0,27 T dibayarkan secara non-tunai

**Belum dibahas di Kemenko Perekonomian

Source: MoF (as of 18 May 2020)

DUKUNGAN APBN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Belanja Negara Rp427,46T

- 1. Dukungan Konsumsi (Bansos/Subsidi): Rp172,1T**
Memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial ekonomi melalui PKH, Kartu sembako, Kartu Pra Kerja, Diskon Tarif Listrik, Bansos Jabodetabek, Bansos tunai Non-Jabodetabek dan Logistik/Pangan/Sembako
- 2. Dukungan Pajak: Rp123,01T**
Insentif fiskal melalui PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25, Pengembalian Pendahuluan PPN, Penurunan Tarif PPh Badan, Cadangan dan Stimulus Lainnya
- 3. Subsidi Bunga Kredit: Rp34,15T**
Meringankan beban pelaku usaha terdampak Covid-19 melalui penundaan angsuran dan subsidi bunga
- 4. Subsidi BBN dalam rangka B-30: Rp2,78T**
Mendukung program B-30
- 5. Imbal Jasa Penjaminan: Rp5T**
Untuk kredit modal kerja UMKM baru
- 6. Pembayaran Kompensasi: Rp90,42T**
Menjaga kondisi keuangan BUMN sektor strategis agar optimal dalam memberikan layanan

Pembiayaan Rp133,51T

- 1. Penyertaan Modal Negara (PMN): Rp25,27T**
Memperbaiki struktur permodalan BUMN yang terdampak dan penugasan khusus dalam program PEN
- 2. Penempatan Dana Pemerintah: Rp87,59T**
Untuk perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit UMKM
- 3. Penjaminan: Rp1T**
Untuk menjamin Kredit Modal Kerja baru bagi UMKM
- 4. Talangan (Investasi): Rp19,65T**
Untuk modal kerja (PT Garuda, Perumnas, KAI, PTPN, KS)

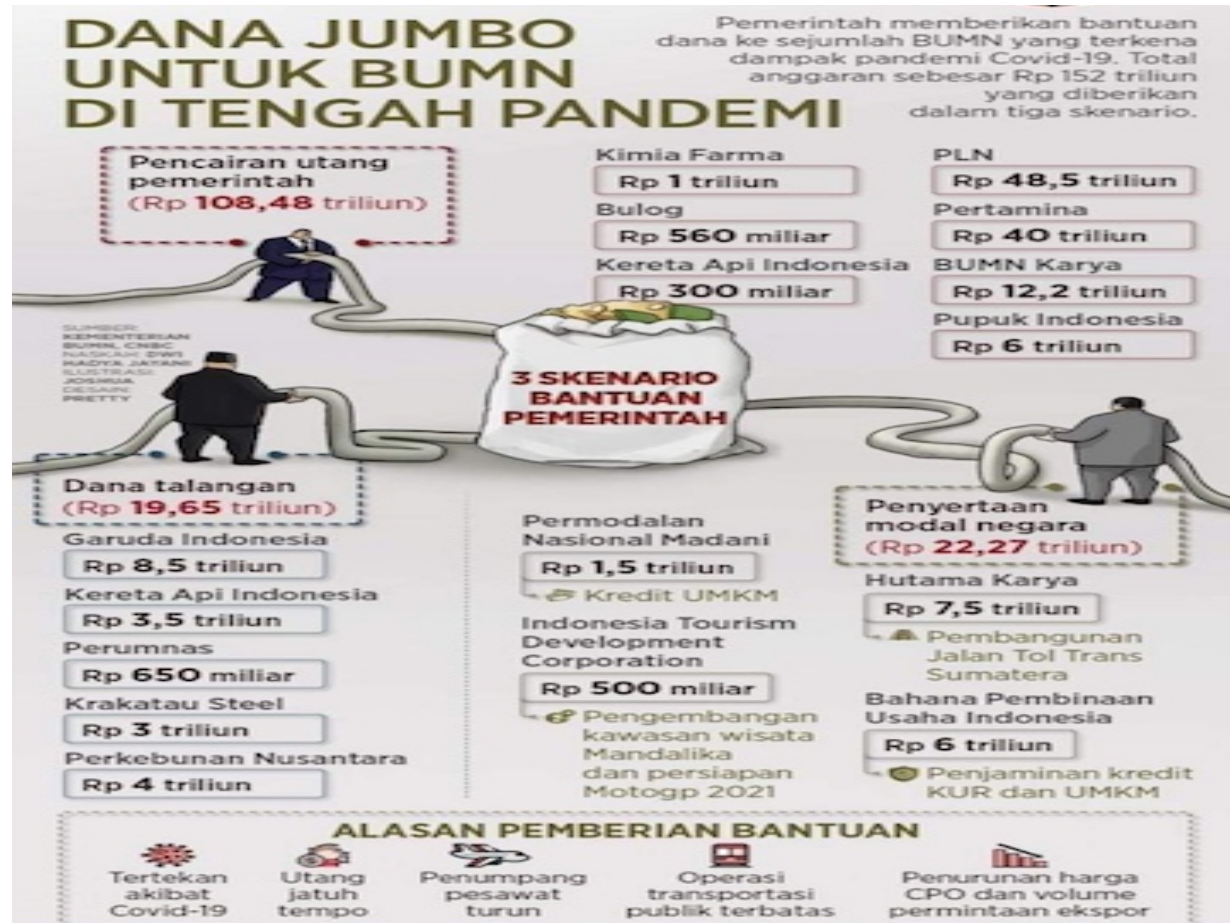
Tambahan Belanja K/L & Sektoral Rp65,1T

- 1. Pariwisata: Rp3,8T**
Diskon tiket pesawat ke destinasi wisata, serta insentif pajak hotel/restoran
- 2. Perumahan: Rp1,3T**
Subsidi bunga dan bantuan uang muka untuk MBR
- 3. Cadangan Stimulus Fiskal Lainnya: Rp60T**

Dukungan Untuk Pemda Rp15,1T

- 1. Cadangan DAK Fisik: Rp9,1T**
- 2. DID Pemulihan Ekonomi: Rp5T**
- 3. Penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah: Rp1T**

STIMULUS BUMN



Nomor : 8179/AGA.04.01/A011100/2020
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa
 Hal : Penghapusan Aturan Jam Nyala Minimum pada Pelanggan Premium dalam Menyikapi Isu Merebaknya Pandemi Covid-19

19 Mei 2020

Kepada

Yth. Ketua Umum
 Himpunan Kawasan Industri
 (HKI) Gedung Krakatau Steel
 Steel Lt. 6
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54
 Jakarta 12950

Memperhatikan surat Himpunan Kawasan Industri (HKI) nomor 042/HKI/IV/2020 tanggal 06 April 2020 tentang Permohonan Penghapusan Aturan Jam Nyala Minimum pada Pelanggan Premium saat Pandemi Covid-19, bersama ini kami mengucapkan terima kasih kepada HKI yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menunjang kegiatan operasional Kawasan Industri.

Menyikapi isu tentang merebaknya Pandemi Covid-19 tentunya menjadi perhatian khusus bagi kita bersama. Kami sangat memahami tekanan kondisi keuangan yang cukup berat pada anggota HKI akibat dampak Covid-19 ini. Demikian juga kondisi ini terjadi pada keuangan PLN dalam upaya mempertahankan suplai listrik ke konsumen.

Terhadap usulan dari HKI terkait dengan penghapusan jam nyala minimum pada pelanggan premium, dengan sangat menyesal kami sampaikan belum dapat dipenuhi. Fokus kami saat ini adalah menjaga kesiapan dan keandalan pasokan listrik.

Kita sama-sama berharap agar kondisi Covid-19 ini segera berakhir sehingga dapat keluar dari tekanan keuangan akibat dampak Covid-19 yang sedang berlangsung.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEVP BISNIS DAN PELAYANAN
 PELANGGAN,



R.YUDDY SETYO WICAKSONO

Tembusan:

STIMULUS SETENGAH HATI

USULAN DUNIA USAHA UNTUK STIMULUS MODAL KERJA BAGI INDUSTRI TERDAMPAK COVID-19



Dunia usaha memerlukan tambahan modal kerja karena selama Pandemi Covid-19 telah terjadi deficit cash flow. Diharapkan Pemerintah bersama OJK memberikan stimulus terkait penambahan modal kerja.

1. Stimulus diberikan untuk semua sektor usaha, tidak hanya Industri Manufaktur saja namun untuk seluruh lini produksi dan penjualan. Hal ini dikarenakan produk manufaktur tidak dapat dikomersilkan tanpa penjualan.
2. Stimulus Modal Kerja diberikan untuk jangka waktu selama 1 (Satu) Tahun.
3. Subsidi suku bunga menyesuaikan suku bunga BI (4,5%).
4. Penurunan Tariff Listrik dan Gas, Relaksasi pembayaran listrik dan Gas (selama 90 hari/ 3 bulan setelah jatuh tempo), dan Pembayaran listrik sesuai penggunaan tanpa beban minimal.
5. Penangguhan pembayaran PPN selama 90 hari.
6. Percepatan waktu restitusi perpajakan.

TERIMA KASIH



APINDO

Gedung Permata Kuningan
Building, Lt. 10

Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur – Setiabudi

Jakarta Selatan 12980

Tel. (62) 21 8378 0824,

Fax. (62) 21 8378 0823/8378 0746

Website: www.apindo.or.id

Email: sekretariat@apindo.or.id

